



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada beberapa urusan yang perlu didukung dengan jabatan- jabatan tertentu dalam rangka untuk mendukung visi, misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan Perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran diubah, dengan menambah Formasi Jabatan Fungsional pada angka 31 sampai angka 34 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 MARET 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	1) Sekretariat Daerah 2) Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan 2) Inspektur Tambang	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kementerian Perdagangan

7.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Medik Veteriner 2) Paramedik Veteriner 3) Pengawas Benih Tanaman 4) Pengawas Bibit Ternak 5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6) Pengawas Mutu Pakan 7) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 8) Penyuluh Pertanian 9) Analis Pasar Hasil Pertanian 	<p>Nomor 52 Tahun 2012</p> <p>Nomor 53 Tahun 2012</p> <p>Nomor 57/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 Jo. KEP/137/M.PAN/9/2004</p> <p>Nomor 2 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/17/M.PAN/4/2006</p> <p>Nomor 22 Tahun 2013</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/05/2008</p> <p>Nomor PER/02/M.PAN/2/2008</p> <p>Nomor 6 Tahun 2012 Jo. Nomor 23 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Pertanian
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh Kehutanan 2) Polisi Kehutanan 3) Pengendali Ekosistem Hutan 	<p>Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002</p> <p>Nomor 11 Tahun 2011</p> <p>Nomor 50 Tahun 2012</p>	<p>B P 4 K</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p>	Kementerian Kehutanan
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Frekuensi Radio 2) Pengawas Keselamatan Pelayaran 3) Penguji Kendaraan Bermotor 	<p>Nomor KEP/51/M.PAN/4/2002 Jo. PER/27/M.PAN/11/2004</p> <p>Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004</p> <p>Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2011</p>	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p>	Kementerian Perhubungan
10.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan) 3) Penyuluh Perikanan 4) Analisis Pasar Hasil Perikanan 	<p>Nomor 22 Tahun 2010</p> <p>Nomor 1 Tahun 2011</p> <p>Nomor PER/19/M.PAN/10/2008</p> <p>Nomor 25 Tahun 2013</p>	<p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p> <p>B P 4 K</p> <p>Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Ketenagakerjaan 2) Instruktur 3) Mediator Hubungan Industrial 4) Pengantar Kerja 5) Penggerak Swadaya Masyarakat 	<p>Nomor 19 Tahun 2010</p> <p>Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003</p> <p>Nomor PER /06/M.PAN/4/2009</p> <p>Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000</p> <p>Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004</p>	<p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>	Kementerian Tenaga Kerja
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pengairan 2) Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Teknik Jalan dan Jembatan 4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5) Penata Ruang 	<p>Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/6/2007</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p>	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Administrator Kesehatan 2) Apoteker 3) Asisten Apoteker 4) Bidan 5) Dokter 6) Dokter Gigi 7) Epidemiologi Kesehatan 8) Entomolog Kesehatan 	<p>Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000</p> <p>Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999</p> <p>Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008</p> <p>Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000</p> <p>Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 	Kementerian Kesehatan

9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
11) Nutritionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
13) Ortosis Prostesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
17) Perakam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah	

	<ul style="list-style-type: none"> 24) Teknisi Gigi 25) Terapis Transfusi Darah 26) Terapis Wicara 27) Dokter Pendidik Klinis 28) Pembimbing Kesehatan Kerja 	<p>Nomor PER/05/M.PAN/4/2007</p> <p>Nomor PER/06/M.PAN/4/2007</p> <p>Nomor PER/48/M.PAN/4/2005</p> <p>Nomor PER/17/M.PAN/9/2008</p> <p>Nomor 13 Tahun 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah 	
14.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Guru 2) Penilik 3) Pamong Belajar 4) Pengawas Sekolah 5) Pengembangan Teknologi Pembelajaran 6) Pranata Laboratorium Pendidikan 	<p>Nomor 16 Tahun 2009</p> <p>Nomor 14 Tahun 2010</p> <p>Nomor 15 Tahun 2010</p> <p>Nomor 21 Tahun 2010</p> <p>Nomor PER/2/M.PAN/3/2009</p> <p>Nomor 3 Tahun 2010</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
15.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pekerja Sosial 2) Penyuluh Sosial 	<p>Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004</p> <p>Nomor PER/06/M.PAN/5/2008</p>	<p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>	<p>Kementerian Sosial</p>
16.	Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<p>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
17.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adikara Siaran 2) Teknisi Siaran 3) Andalan Siaran 4) Pranata Humas 	<p>Nomor 130/M.PAN/1989</p> <p>Nomor 128/M.PAN/1989</p> <p>Nomor 129/M.PAN/1989</p> <p>Nomor PER/109/M.PAN/11/2005</p>	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>

18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan 2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Nomor 39 Tahun 2011	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Kementerian Lingkungan Hidup
19.	Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	Analisis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analisis Kepegawaian 2) Auditor Kepegawaian 3) Assessor SDM Aparatur	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Nomor 40 Tahun 2012 Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23.	Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional
24.	Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	Surveyor Pemetaan	Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
27.	Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
28.	Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara

30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Unit Layanan Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31.	Peneliti	Nomor KEP /128/M.PAN/9/2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
32.	Perakayasa	Nomor PER/219/M.PAN/6/2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPPT)
33.	Penyuluh Hukum	Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
34.	Satpol PP	Nomor 4 Tahun 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri

BUPATI SANGGAU,
tttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002